

Implementasi Program Prioritas Lamongan Sehat dan Sejahtera dengan Kunjungan Rumah (Laserku) Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan di Desa Karangsambigalih Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan

Putri Sholikhah¹, Suci Megawati²

^{1,2}Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya

e-mail: putrisholikhah.21078@mhs.unesa.ac.id¹, sucimegawati@unesa.ac.id²

Published: July , 2025

ABSTRAK

Kesehatan merupakan salah satu indikator derajat kesehatan pada angka harapan hidup suatu daerah. Tinggi atau rendahnya derajat kesehatan suatu daerah dipengaruhi oleh keadaan sosial, ekonomi, maupun kesehatan masyarakat pada daerah sehingga dengan cakupan wilayah yang luas diperlukan sebuah kebijakan untuk memantau secara langsung kondisi masyarakat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Laserku di Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi penanggungjawab program, petugas kesehatan, perangkat desa, kader sukarelawan di tiap dusun, serta masyarakat penerima layanan Program Laserku. Landasan teori pada penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh George Edward III.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Laserku di Desa Karangsambigalih berjalan cukup efektif sesuai dengan pedoman standar operasional prosedur, meliputi kegiatan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan untuk memantau kondisi lansia yang hidup sebatang kara, masyarakat kurang mampu yang mengidap penyakit kronis, masyarakat kelas sosial ekonomi rendah yang belum terdata JKN, dan masyarakat yang tinggal di rumah tidak sehat.

Dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa hambatan, yaitu: pemerintah daerah meningkatkan jumlah tenaga kesehatan di desa, menambah jadwal rutin pemeriksaan masyarakat sasaran, melakukan sosialisasi berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan, serta melakukan sosialisasi berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak mengikuti program Laserku. Dan untuk masyarakat sasaran dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan dimulai dengan menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

Kata kunci: *Kebijakan Publik, Program Laserku, Kesehatan*

ABSTRACT

Health is one of the indicators of health degree in the life expectancy of a region. The high or low degree of health of an area is influenced by the social, economic, and health conditions of the people in the region so that with a wide area coverage, a policy is needed to directly monitor the condition of the community. This study aims to describe the implementation of the Laserku Program in Karangsambigalih Village, Sugio District, Lamongan Regency and identify supporting and inhibiting factors in its implementation. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation. The informants in this study include the person in charge of the program, health workers, village officials, volunteer cadres in each

hamlet, and the community receiving the Laserku Program's services. The theoretical basis of this study is the theory of policy implementation by George Edward III.

The results of the study showed that the implementation of the Laserku Program in Karangsambigalih Village was quite effective in accordance with the standard operational procedure guidelines, including home visits by health workers to monitor the condition of the elderly who live alone, underprivileged people who suffer from chronic diseases, people from low socioeconomic classes who have not been recorded as JKN, and people who live in unhealthy homes.

In its implementation, several obstacles were found, namely: the local government increased the number of health workers in the village, increased the routine schedule of inspections of the target community, conducted continuous socialization to increase public awareness in maintaining personal health and the environment, and conducted continuous socialization to increase public understanding of the impact of participating in the Laserku program. And for the target community, they are urged to always maintain their health, starting with maintaining the health of themselves and the environment.

Keywords: *Public Policy, Laserku Program, Health*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi banyak orang pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik di negara modern adalah pelayanan publik, yaitu segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak (Engkus, 2022)

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi kehidupan manusia. Kebijakan kesehatan adalah salah satu hasil dari penerapan kebijakan publik yang tujuan di implementasikannya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada bidang kesehatan. Negara dengan indeks kesehatan yang baik akan berpengaruh dalam hal ekonomi kesejahteraannya, oleh karena itu kesehatan merupakan aset berharga yang harus dijaga dan ditunjang dengan fasilitas serta pelayanan publik yang memadai. Ada beberapa faktor penentu jangka panjang kehidupan seseorang yakni peningkatan sanitasi, gizi, kemajuan dalam bidang medis, pelayanan kesehatan, kesejahteraan ekonomi dan pendidikan. Dengan ini penuaan penduduk dilihat sebagai kacamata asset, bukan sebagai beban (Topatimasang, 2013).

Pemerintah Indonesia berusaha membuat peningkatan program kesehatan yang ditujukan untuk terciptanya kesejahteraan kesehatan yang merata di setiap lapisan masyarakat. Aspek kelayakan program ditunjang dengan perbaikan fasilitas, tenaga ahli, dan pelayanan yang menjadi fokus utama dalam berhasilnya program yang dijalankan. Dengan melihat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas maka kebutuhan tersebut disesuaikan dengan kondisi daerah pelaksana program.



Diagram Angka Harapan Hidup dalam Databooks Suara Surabaya, 2022

Data diagram diatas menjelaskan bahwa Indonesia masih menempati indeks angka harapan hidup yang cukup rendah dengan rasio 68,25 tahun, hal ini membuat Indonesia berada pada posisi negara dengan AHH terendah kedua di kawasan ASEAN. Penduduk yang memiliki umur panjang umumnya menunjukkan tingkat kesehatan yang baik. Angka Harapan Hidup (AHH) berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta memajukan derajat kesehatan. Jika sebuah daerah memiliki Angka Harapan Hidup yang rendah, hal ini menandakan bahwa upaya pembangunan kesehatan belum membuahkan hasil yang diharapkan, sedangkan semakin tinggi AHH menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan kesehatan di daerah tersebut (Ginting & Lubis, 2023).

Upaya yang dilakukan daerah dalam mengatasi masalah kesehatan di masyarakat adalah salah satunya dengan membuat kebijakan pembentukan program kesehatan, pembuatan kebijakan ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan manfaat yang maksimal. Penerapan kebijakan kesehatan nasional berfokus pada peningkatan kesejahteraan penduduk dan status kesehatan. Faktor utama dalam perumusan kebijakan kesehatan pada kebijakan publik yang semakin menguat ini didasari oleh karakteristik yang unik pada sektor kesehatan yang kompleks serta menyangkut hajat hidup masyarakat dan ketidakpastian dalam kondisi sakit (Anggita et al., 2018). Untuk mendukung lancarnya rancangan yang sudah dibuat maka diperlukan kolaborasi yang baik dari semua aspek sumberdaya yang tersedia, sumberdaya yang besar akan berpengaruh signifikan dalam penerapannya jika ditunjang oleh pemerintah yang mendukung kebijakan tersebut, hal ini disebabkan karena pemerintah menjadi aktor kunci dalam implementasi kebijakan yang akan dijalankan dan didukung juga oleh jejaring yang kuat (Irwanto, 2024).

Hal ini dibuktikan melalui indeks angka harapan hidup salah satu wilayah di Indonesia yakni pada Provinsi Jawa Timur yang mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga 2023. Kenaikan angka harapan hidup ini tak lepas dari kontribusi peran Kabupaten dan Kota dalam merumuskan serta mengembangkan inovasi pelayanan publik yang solutif untuk menunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat yang harmoni. Fakta tersebut didukung dengan data statistik Badan Pusat Statistik Indonesia per 27 Maret 2024 :



Diagram Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Timur, BPS 2024

Data diagram diatas menunjukkan wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 - 2023 memiliki indeks Angka Harapan Hidup yang cenderung naik di semua gender. Pemerataan pelayanan kesehatan menjadi acuan pokok dalam meningkatnya rasio tersebut. Hal ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk semakin memperbaiki sistem kesehatan agar indeks tersebut terus mengalami kenaikan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 dijelaskan bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis” dan “Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat”. Hal ini diperkuat dengan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada bab III Pasal 6 dan 7 yang berbunyi “Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat” dan “Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peraturan tersebut lalu dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan mengadopsi landasan Otonomi Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak melakukan kegiatan dan berwenang untuk mengatur hal tersebut bagi kepentingan masyarakat. Kebijakan ini pun ditindaklanjuti oleh Pemerintah 6 Kabupaten Lamongan sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

Wilayah yang luas membuat Kabupaten Lamongan memiliki tantangan dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Meski memiliki berbagai fasilitas kesehatan, beberapa masyarakat mengalami kendala untuk menjangkau fasilitas kesehatan tersebut diakibatkan wilayah pemukiman yang jauh dari fasilitas kesehatan dan akses yang sulit. Dengan melihat kondisi permasalahan yang dihadapi maka Pemerintah Kabupaten Lamongan merancang sebuah program kesehatan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan serta memperbaiki derajat kesehatan masyarakat dengan peninjauan secara rumah ke rumah. Program Prioritas Lamongan Sehat dengan Kunjungan Rumah (Laserku) ini termasuk dalam program prioritas yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026. Program yang diprakarsai oleh Bupati Kabupaten Lamongan Dr. Yuhronur Efendi, MBA., M.EK ini memiliki fokus mengentaskan masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Lamongan melalui pendekatan kunjungan rumah atau *door to door*.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi dibentuknya inovasi program layanan kesehatan ini adalah dengan melihat angka derajat kesehatan masyarakat, keadaan sosial ekonomi yang rendah, serta akses fasilitas kesehatan yang sulit dijangkau, karena salah satu faktor yang mendasari turunnya kualitas hidup diakibatkan oleh peningkatan angka pengangguran, kemiskinan, dan gangguan kesehatan (Ibad & Megawati, 2024). Tujuan dibentuknya program ini sejalan dengan peraturan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Program ini masuk dalam 11 program prioritas yang tertera dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 . Program ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat dengan menyediakan layanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah diakses di rumah mereka menggunakan metode home services. Dampak program Laserku pada bidang kesehatan dapat di lihat pada data BPS di Kabupaten Lamongan yang diambil tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa naik turunnya angka Kesehatan di Kabupaten Lamongan tidak mengalami lonjakan yang begitu tajam, serta data dari iNews Jatim yang menyebutkan bahwa Kehadiran Laserku juga membuat meningkatnya kemandirian pasien mencapai 27 persen. Lewat inovasi ini mampu meningkatkan Angka Harapan Hidup 8 (AHH) masyarakat Lamongan dari 72,49 di 2021 menjadi 72,86 di tahun 2022. Selain itu, Indeks Kesehatan pada 2022 0,813 mengalami peningkatan dibandingkan 2021 yang berada di angka 0,808.

Program Laserku bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam akses layanan kesehatan dengan melakukan kunjungan rumah secara rutin. Dengan cara ini, diharapkan dapat meningkatkan deteksi dini penyakit, pemantauan kondisi kesehatan, serta pemberian edukasi kesehatan langsung kepada masyarakat. Kunjungan rumah juga berpotensi mengurangi angka ketidakhadiran pasien di fasilitas kesehatan dan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan dan perawatan. Pada data yang diperoleh dari rapat evaluasi bersama program Laserku menunjukkan bahwa Kecamatan Sugio memiliki tingkat implementasi program tertinggi di Kabupaten Lamongan. Kecamatan Sugio memiliki 21 desa dengan total luas wilayah 94,43 km², salah satu desa yang berada di Kecamatan Sugio adalah Desa Karangsambigalih. Desa Karangsambigalih memiliki total luas wilayah 4,03 km² yang terbagi menjadi beberapa dusun. Atas dasar permasalahan dan keterangan pada latarbelakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada implementasi Program Lamongan Sehat dan Sejahtera dengan Kunjungan Rumah, yang dituangkan dalam judul "Implementasi Program Lamongan Sehat dan Sejahtera dengan Kunjungan Rumah di Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan'."

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis fenomena masalah kesehatan dengan solusi program yang ditawarkan pemerintah melalui program Prioritas Lamongan sehat dan sejahtera dengan kunjungan rumah (LASERKU) di Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, serta dapat menjabarkan bagaimana mekanisme program tersebut dijalankan. Sebagai hasilnya dapat diketahui bagaimana implementasi program Prioritas Lamongan sehat dan sejahtera dengan kunjungan rumah (LASERKU) di Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan kesehatan di Kabupaten Lamongan.

Informan penelitian diambil para pelaksana program Laserku berdasarkan data pelaksana program pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2020 dan keterangan dari Kepala Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagai penanggung jawab pusat program. Adapun para subjek penelitian tersebut adalah Kepala Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Kepala Tata Usaha Puskesmas Kecamatan Sugio, Kepala Desa Karangsambigalih, Penanggungjawab Program Laserku Kecamatan Sugio, Bidan Desa Karangsambigalih, dan masyarakat sasaran.

Pengambilan informasi merujuk pada teori George Edward III dengan memperhatikan 4 indikator analisis ,yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu pengambilan data juga terfokus pada data primer dan sekunder dengan data primer yakni para aktor yang terlibat langsung pada pelaksanaan program, dan data sekunder sebagai data pendukung yang diambil dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Program Prioritas Lamongan Sehat dan Sejahtera dengan Kunjungan Rumah (LASERKU) merupakan sebuah program prioritas layanan kesehatan menggunakan sistem kunjungan rumah atau door to door yang di gagas oleh Bupati Kabupaten Lamongan Dr. Yuhronur Efendi, MBA., M.EK dan telah di sahkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kabupaten Lamongan tahun 2020-2024 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026, dengan dasar Peraturan Daerah 57 Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat. Implementasi Program Laserku ini meliputi seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Lamongan termasuk Desa Karangsambigalih. Desa Karangsambigalih merupakan sebuah Desa dengan jumlah penduduk menurut data terakhir tanggal 05 Februari 2025 sebanyak 464 anggota keluarga.

Data terakhir dari rekapan penanggungjawab program Laserku di Kecamatan Sugio mencatat sebanyak 969 warga yang menjadi penerima program Laserku di Kecamatan Sugio, dan 172 diantaranya berasal dari Desa Karangsambigalih. Pasien yang masuk dalam sasaran sebagian besar adalah warga

dengan kondisi hidup sebatang kara dan memiliki penyakit kronis. Petugas medis yang bertugas melakukan kontrol pasien sebanyak 2-3 kali dalam satu minggu. Kunjungan kontrol tersebut biasanya melibatkan 2-3 orang tenaga medis, pemeriksaan pasien meliputi kontrol progress kesembuhan pasien dan pemberian obat sesuai hasil perkembangan kesehatan pasien. Hasil evaluasi perkembangan warga tersebut akan dilaporkan langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan diteruskan pada Bupati Kabupaten Lamongan sebagai monitoring program. Penelitian ini fokus pada pelaksanaan Program Prioritas Lamongan Sehat dengan Kunjungan Rumah di Desa Karangsambigalih Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dengan menggunakan teori implementasi George C. Edward III. Teori ini mengukur implementasi kebijakan berdasarkan empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Temuan peneliti dijelaskan di bawah ini :

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam (Nursalim, 2017), komunikasi diartikan sebagai proses komunikator penyampaian kepada informasi komunikan. Komunikasi yang terbentuk antara para stakeholder program mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakan yang sedang dijalankan oleh para pelaksana program. Pengaruh yang ditimbulkan dari terjalannya komunikasi yang baik adalah bagaimana informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh 58 lawan bicara. Beberapa kesalahpahaman terjadi diakibatkan oleh proses transfer informasi yang kurang komunikatif antar lawan bicara. George Edward III menjelaskan beberapa unsur komunikasi yang dapat membantu informasi yang akan disampaikan dapat diterima dan tersampaikan dengan baik oleh lawan bicara sebagai berikut :

1) Transmisi

Menurut Edward III dalam (Rahmatillah et al., 2023) Transmisi atau penyaluran komunikasi adalah aspek dalam komunikasi berupa keputusan-keputusan kebijakan program dalam mengimplementasikan kebijakan. Kunci komunikasi agar berjalan dengan baik adalah bagaimana proses penyampaian informasi dua lawan bicara tersebut terjalin dengan baik dan komunikatif, transmisi informasi antara para pelaksana implementasi kebijakan berpengaruh dalam bagaimana program tersebut berjalan. Namun keadaan di lapangan nyatanya terkadang tidak berbanding lurus dengan teori yang ada, beberapa kendala menjadi tantangan implementasi kebijakan sehingga perlu adanya sosialisasi internal mengenai pembahasan transmisi informasi implementasi kebijakan program tersebut.

Transmisi komunikasi yang dilakukan pihak pelaksana program kepada masyarakat terjadi antar rumah ke rumah, sosialisasi yang dilakukan tidak diadakan secara massal disebabkan oleh pelaksanaan program Laserku yang memang bertujuan menjangkau masyarakat kelas sosial ekonomi rendah yang langsung terdata oleh pihak desa melalui kepala dusun setempat. Secara penyampaian transmisi komunikasi yang dilakukan oleh pihak petugas kesehatan mendapat respon yang baik oleh 60 masyarakat sasaran seperti yang diterangkan oleh salah satu penerima sasaran program yakni Ibu Wati'ah sebagai berikut: "komunikasi yang diberikan petugas waktu pelayanan juga jelas mbak, saya itungannya ini kan masuk sepuh harus dijelaskan berulang-ulang dan petugasnya tetep sabar dan tetap menyampaikan dengan Bahasa yang mudah saya mnegerti. " (Wawancara pada 28 Februari 2025)

2) Kejelasan

Menurut Edward III dalam (Posangi et al., n.d.) menerangkan bahwa dalam rangka komunikasi kebijakan adalah kejelasan (clarity) komunikasi. Dikatakan bahwa jika suatu kebijakan dapat sebagaimana yang diimplementasikan diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi tersebut harus jelas. Komunikasi yang jelas akan berpengaruh pada kualitas informasi yang akan disampaikan oleh lawan bicara. Kejelasan informasi dalam implementasi suatu kebijakan akan berdampak serius jika aturan yang digunakan tidak runtut dan sesuai standar Operasional Pelaksana (SOP). Kesalahpahaman daya tangkap informasi SOP akan berdampak pada pelayanan

program yang kurang maksimal, disisi lain program yang tidak maksimal akan berdampak pada implementasi kebijakan suatu program secara keseluruhan.



Tabel SOP Laserku Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, 2024

Tabel diatas menunjukkan SOP yang dilakukan untuk penanganan pasien ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yenny selaku kepala bidang pelayanan kesehatan yang membawahi program Laserku ini menerangkan bahwa : “SOP yang kita jalankan sudah melalui proses musyawarah dengan stakeholder yang kita tunjuk untuk implementasi program ini mbak, hasil musyawarah yang kita hasilkan ini lalu kita kaji Kembali Bersama Bapak Bupati Lamongan untuk mendapat persetujuan sehingga nantinya bisa kami terapkan dan mencegah terjadinya kesalah pahaman antar para pelaksana program.” (Wawancara pada 25 Februari 2025) Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Mujilah selaku penanggung jawab Program Laserku di Kecamatan Sugio bahwa : “Ketika terjadi kesalahpahaman antar stakeholder, kita akan langsung konfirmasi dengan pihak Dinkes mbak. Kami mengonfirmasi apakah memang ada kesalahan SOP yang kami lakukan atau memang dari stakeholder lain yang terjadi salah tangkap informasi, dan alhamdulillah pihak Dinkes gercep 65 untuk merespon dan akhirnya masalah tersebut cepat teratasi. Karena memang dulu pernah ada contoh kasus kesalahpahaman prosedur mbak, jadi belajar dari pengalaman itu kami juga terus berbenah.” (Wawancara pada 28 Februari 2025) Berdasarkan keterangan wawancara dan observasi yang penulis lakukan, penerapan komunikasi dengan mengedepankan aspek kejelasan dalam penyampaian informasi terkait SOP pada pelaksana kegiatan maupun pada sasaran penerima program sangatlah penting, penyampaian informasi secara jelas berpengaruh terhadap tersampainya dengan baik tujuan dari program tersebut sehingga akan mempengaruhi implementasi program tersebut dilapangan. Jika informasi mengenai aturan tidak jelas maka sudah dapat dipastikan bahwa implementasi kebijakan tersebut akan menemui banyak hambatan.

3) Konsistensi

Menurut Edward III dalam (Roni et al., n.d.)Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan

pelaksana kebijakan, target grup dan pihak pihak yang berkepentingan. Informasi atau aturan yang dilakukan terus menerus dan memiliki kesesuaian standar operasional pelayanan adalah salah satu bentuk konsistensi. Konsistensi aturan dalam implementasi suatu kebijakan menentukan arah pelaksanaan program tersebut. Dilihat dari hasil observasi penulis diketahui bahwa konsistensi aturan tersebut juga berlaku pada Program Laserku ini, informasi yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada para pelaksana kebijakan menjadi tolak ukur konsistensi informasi suatu SOP implementasi kebijakan. Hal ini sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan suatu program yang sedang dijalankan, tanpa konsistensi aturan dari pihak penanggung jawab maka kegiatan yang akan dilakukan akan mengalami kesalahpahaman dalam pelaksanaannya. Sementara itu konsistensi komunikasi dilakukan oleh pelaksana program dan masyarakat dilakukan 2-3 kali seminggu untuk memantau perkembangan pasien sasaran laserku, seperti yang di terangkan oleh salah satu sasaran Laserku yakni Ibu Samining, sebagai berikut : “Lumayan sering mbak kontrol dari Bu Bidan, satu minggu 2x, soalnya juga sakitnya kronis dan nggak ada keluarga jadi sering dipantau 66 perkembangannya. Bu bidan juga kalua menjelaskan tahapan-tahapan obat sama rujukan kalua lagi kambuh juga jelas, saya nangkepnya mudah, maklum sudah sepuh juga. ” (Wawancara pada 28 Februari 2025)

Hasil rapat kerja evaluasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan pada akhir tahun 2024 untuk merundingkan apasaja kendala yang dihadapi saat program Laserku dijalankan serta capaian yang sudah diraih serta laporan tingkat penerima sasaran program di lapangan. Konsistensi juga dapat kita lihat ketika terjadi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut, langkah apa yang akan di ambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, konsistensi komunikasi melalui forum diskusi juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan sebuah implementasi sebuah kebijakan, serta didukung dengan konsistensi komunikasi yang baik tentu akan menjadi nilai tambah pada implementasi suatu kebijakan. Pada pelaksanaannya antara para pelaksana program dan penanggung jawab program memiliki konsistensi komunikasi yang baik dalam pemecahan suatu masalah

2. Sumberdaya

1) Sumberdaya Manusia

George C. Edward III dalam (J. E. Putri & Prabawati, 2023) mendefinisikan sumberdaya sebagai faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya yang cukup dan keterampilan yang ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Makna ini mengacu pada Tujuan sumberdaya sebagai alat yang digunakan untuk menjalankan sebuah aktivitas atau rencana baik secara individu maupun kelompok. Sumberdaya menjadi salah satu komponen unsur pembentukan suatu rencana, dalam konteks pemerintahan yakni sebuah kebijakan. Sumberdaya 67 tidak lepas dari peran pembuat kebijakan dalam menentukan takaran sumberdaya apa saja yang dibutuhkan. Implementasi sebuah kebijakan dalam output sebuah program harus didukung dengan pemetaan sumberdaya yang baik. Sebuah rancangan kebijakan menurut George Edward III memiliki 3 komponen, Gambaran komponen tersebut adalah sebagai berikut :

Menurut Edward III dalam (Sunarto, 2021) yaitu sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumberdaya manusia menurut para ahli merupakan sumberdaya utama penggerak suatu kegiatan atau kebijakan. Ide dan penelitian sebagai awal mula rancangan sebuah kebijakan lahir dari kontribusi manusia baik secara individu maupun kelompok. Sumberdaya manusia juga berperan penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa sumberdaya manusia adalah peran penting dari terealisasinya sebuah kebijakan.

kerjasama yang dilakukan oleh tim yang ada di tingkat Kecamatan untuk berbagi tugas menjalankan program Laserku ini, pembagian tim dilakukan sesuai tupoksi bidang

kerja masing-masing. Tim Desa bertugas untuk mendata siapa saja yang berhak menjadi sasaran program dan tim puskesmas yang bergerak untuk melakukan penanganan kepada pasien. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Mujilah selaku penanggung jawab Program Laserku Kecamatan Sugio dan Bidan Desa Karangsambigalih Kecamatan Sugio sebagai berikut : Kami disini tidak serta merta bekerja sendiri mbak, kami melakukan kerja sama tim dengan berbagi tugas siapa yang mendata sasaran warga penerima Program Laserku dan setelah data tersebut terkumpul baru kami lakukan eksekusi penanganan pasien sesuai SOP yang ada. Selain itu kami juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk persetujuan pasien ketika mendapat rujukan ke Rumah Sakit Daerah dan juga melaporkan progress dan kendala yang terjadi selama program tersebut dijalankan.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Yani selaku kepala bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan yang menuturkan bahwa : Iya mbak, kami disini juga selalu melakukan evaluasi terkait koordinasi yang terjalin antara para pelaksana program di lapangan, Pak Bupati juga setiap Selasa ada kegiatan kopi morning yang salah satu tujuannya adalah menampung informasi apa saja terkait pelaksanaan program-program yang dijalankan termasuk Program Prioritas Lamongan Sehat dan Sejahtera dengan Kunjungan Rumah ini. Kami terbuka dengan segala informasi yang disampaikan, jika memang ada informasi yang 69 kurang baik maka kita perbaiki dan jika ada berita positif tentu kami sangat senang dan berusaha lebih baik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis dan Pak Siswanto selaku Kepala Desa Karangsambigalih menerangkan bahwa Pemerintah Desa Karangsambigalih berusaha untuk mengoptimalkan peran desa dalam tim yang sudah dibentuk oleh Dinas Kesehatan pada program Laserku ini sebagai berikut : “Aparatur Pelayanan Masyarakat Desa Karangsambigalih ini mengedepankan kepuasan masyarakat mbak, kami berusaha untuk menjalankan program prioritas yang menjadi arahan dari Bapak Bupati dan didukung dengan program yang kami rancang sendiri juga untuk memaksimalkan hasil dari program yang sudah ada, untuk tenaga kesehatannya kami punya 2 bidan desa yang ditugaskan oleh Puskesmas mbak dan dibantu ibu-ibu kader yang diambil dari masing masing dusun, gunanya untuk bisa memetakan fokus pelayanan dan nantinya dapat mencapai hasil yang diharapkan.” (Wawancara pada 26 Februari 2025)

2) Sumberdaya Finansial

Sumberdaya Finansial berkaitan dengan aspek pemenuhan kebutuhan program implementasi kebijakan pada bidang finansial atau keuangan. Tujuan sumberdaya finansial ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kegiatan serta menjadi tolak ukur peningkatan kesejahteraan. Pengelolaan sumberdaya finansial yang terarah berpengaruh pada berjalannya implementasi program kebijakan yang sedang dilaksanakan. Termasuk pada pengelolaan sumberdaya finansial yang ada pada Program Prioritas Laserku, anggaran guna berjalannya program ini telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan selaku pembuat program. Hal ini juga sama teruji pada Pemerintahan Desa Karangsambigalih, keterangan yang penulis dapatkan dari Kepala Desa adalah pengelolaan dana desa untuk kegiatan desa bagi Masyarakat memang sudah ada anggarannya, termasuk pada bidan kesehatan. APBD Kabupaten Lamongan untuk Program Laserku terbagi untuk beberapa pelaksana kebijakan dan stakeholder, pembagian anggaran dipecah untuk para tenaga kesehatan yang bertugas berupa gaji bagi Pegawai Negeri Sipil daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan, sarana dan prasarana, obat-obatan dan biaya operasional Rumah Sakit serta Puskesmas.

Rancangan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dalam program pelayanan kesehatan bagi Masyarakat yang tercantum dalam APBD Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2024. Sedangkan untuk pembagian anggaran di Desa Karangsambigalih Kepala Desa memberikan insentif kepada kader-kader yang

diambil dari beberapa dusun untuk membantu pelaksanaan program-program Desa dan Laserku. Pak Siswanto selaku Kepala Desa Karangsambigalih juga menambahkan bahwa : “Ketika memang kita membutuhkan tenaga untuk membantu menjalankan kegiatan maka memang seharusnya kita juga memberikan timbal balik atas bantuan tersebut kepada kader-kader mbak, hitungannya memang tidak banyak mbak, tapi semoga bisa buat tambahan kebutuhan dirumah. Toh juga tidak semua orang mau kalau diminta tolong buat bantu-bantu melayani kebutuhan Masyarakat, jadi pas ada yang mau membantu kita juga memberikan apresiasi meskipun tidak banyak.” (Wawancara pada 26 Februari 2025)

Dilihat dari hasil wawancara dan observasi peneliti diatas maka pernyataan tersebut juga menjadi bukti bahwa tercukupinya kebutuhan finansial atas suatu program menjadi salah satu aspek penting bagi pelaksanaan suatu kebijakan, terpenuhinya aspek secara finansial membantu kesejahteraan para pelaksana dan penerima program.

3) Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Sedangkan menurut para ahli pada sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi sebagai alat utama atau alat bantu dalam melaksanakan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang berkaitan dengan organisasi kerja. Kebutuhan sarana dan prasarana berkaitan dengan tercukupinya fasilitas pendukung suatu kegiatan.



Gambar Mobil Sehat Desa Karangsambigalih, 2025

Gambar diatas merupakan salah satu sarana prasaran yang dimiliki oleh Desa Karangsambigalih dan Puskesmas Kecamatan Sugio yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menunjang fasilitas kesehatan yang diberikan kepada setiap desa dan instansi kesehatan/puskesmas di Kabupaten Lamongan, bantuan fasilitas ini berguna untuk mempercepat penanganan pasien yang akan dirujuk ke RSUD Dr.Soegiri Kabupaten Lamongan maupun rujukan ke Rumah Sakit lain bagi pasien.



Gambar Fasilitas Kesehatan Polindes Desa Karangsambigalih, 2025

Sedangkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagai penyelenggara program memiliki fasilitas sarana dan prasarana berupa FKTP maupun FKTL seperti

gambar diatas. Manfaat sarana dan prasarana 84 yang mumpuni bagi kelancaran kegiatan dapat di lihat ketika kinerja pegawai dan pelaksana program semakin efektif dan efisien. Sarana dan prasarana juga menjadi dasar bagaimana program yang sedang dijalankan menuai banyak manfaat untuk masyarakat atau tidak.

Faktor kelengkapan peralatan dalam suatu institusi mempengaruhi dampak kegiatan yang sedang dijalankan, sarana dan prasarana yang baik tentu mendukung indeks kenaikan capaian mutu suatu kegiatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mendapatkan hasil bahwa sarana dan prasarana yang digunakan di Desa Karangsambigalih sudah memenuhi standar kelayakan operasional kegiatan, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.

3. Disposisi

Disposisi menurut Edward III dalam (Rahmatillah et al., 2023) yakni jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Sedangkan pengertian lain terkait Disposisi disampaikan oleh (Jumiati, n.d.) yaitu sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program atau kebijakan, khususnya para pelaksana yang menjadi implementator program. Sedangkan menurut (Yalia, 2014) disposisi adalah 85 Kecenderungan sikap dapat dilihat dari tanggung jawab/komitmen aparat dalam melaksanakan tugasnya, komitmen para pelaksana menjadi bentuk tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh pimpinan sebagai bentuk pelayanan kepada Masyarakat. Definisi disposisi menurut Katz (2009) adalah kecenderungan untuk berperilaku secara sadar, teratur, dan sukarela untuk mencapai tujuan tertentu. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan diukur melalui konsistensi pelaksana dalam menjalankan program. Sedangkan menurut Yunarti (2011) Gavriel Salomon mendefinisikan disposisi sebagai kumpulan sikap-sikap pilihan dengan kemampuan yang memungkinkan sikap-sikap pilihan tadi muncul dengan cara tertentu. Optimalisasi kinerja pegawai akan berdampak pada kualitas pelaksanaan program, Adapun kualitas implementasi yang baik juga dipengaruhi oleh para pelaksana yang kompeten di bidangnya.

Setiap program memiliki disposisinya masing-masing, yakni pengangkatan birokrasi dan insentif, termasuk pada Program Laserku. Penjelasan disposisi terbagi menjadi dua, seperti dibawah ini :

1) Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan birokrasi dengan tujuan sebagai pelaksana program diperlukan penyaringan tenaga pelaksana yang kompeten dan memang ahli dibidangnya. Pengangkatan birokrasi pada Program Laserku ini diambil dari pegawai yang memang kompeten dibidangnya, seperti tenaga kesehatan dan koordinasi dengan beberapa Dinas lain sebagai stakeholder. Sedangkan pengangkatan tenaga pelaksana di Desa Karangsambigalih memiliki perbedaan dalam perekrutannya. Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Karangsambigalih, perekrutan tenaga pelaksana tambahan diambil dari ibu-ibu kader yang diambil dari setiap dusun, hal ini berguna sebagai salah satu strategi pemantauan jalannya program yang dapat dikoordinasi secara terpusat.

2) Insentif

Pemberian dana kepada tenaga pelaksana suatu kegiatan merupakan salah satu bentuk apresiasi yang diberikan oleh instansi sebagai apresiasi terkait kinerja yang sudah dilaksanakan. Namun, hal ini tidak bersifat wajib bagi semua pelaksana program, hal ini juga berlaku pada Program Laserku. Pelaksana program Laserku tidak mendapatkan insentif terkait pelaksanaan program tersebut, insentif yang diterima oleh para pelaksana program berupa gaji merupakan honor yang sama yang diberikan oleh Pemerintah

Kabupaten Lamongan seperti biasanya, karena pelaksanaan 86 Program Laserku ini termasuk dalam beban tugas yang memang dimiliki oleh setiap pegawai pemerintah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, salah satunya lewat program-program rancangan pemerintah. Di Desa Karangsambigalih pemberian insentif diberikan kepada para Kader yang di rekrut guna pelaksanaan program secara efektif dan efisien. Besaran insentif yang diterima oleh kader-kader tersebut berkisar pada angka tiga ratus sampai lima ratus ribu rupiah per orang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Karangsambigalih saat wawancara dengan peneliti : “Uang tambahan yang dikasihkan ke ibu-ibu kader juga nggak banyak kok mbak. Itung-itung tanda terimakasih karena sudah mau direpotkan buat membantu pelayanan ke masyarakat. Mungkin uangnya bisa buat tambahan kebutuhan di rumah kan lumayan, jadi tetap kita kasih .” (Wawancara pada 26 Februari 2025)

Dilihat dari hasil wawancara dan observasi penulis maka pemberian insentif yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangsambigalih bertujuan untuk memberikan tambahan keuangan kepada para kader yang sudah bersedia membantu menjalankan program tersebut untuk tercapainya implementasi program dengan maksimal.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III dalam (Laary et al., 2022) merupakan faktor penting ke empat dalam implementasi kebijakan publik. Birokrasi sering dipandang sebagai instrumen administrasi rasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu melalui koordinasi pekerjaan banyak orang secara teratur. Struktur birokrasi menjadi salah satu acuan suatu instansi dalam menentukan para perancang program -program yang akan dilaksanakan, suatu kegiatan yang memiliki mutu yang baik tentu dirancang oleh pegawai suatu birokrasi yang kompeten dibidangnya serta analisis lapangan dan data yang mumpuni.

1) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) Menurut Edward III dalam (Ma'ruf et al., n.d.) menerangkan bahwa merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, serta kebutuhan penyeragam dalam kerangka kerja baik. Standar Operasional Prosedur (SOP) dibutuhkan untuk menjadi acuan program tersebut dijalankan. Suatu program yang memiliki SOP yang terstruktur berpotensi berjalan dengan lancar dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Pengaruh SOP ini juga terjadi pada Program Laserku, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagai perancang SOP melakukan pemetaan dan analisis struktur SOP yang akan diterapkan oleh para pelaksana program dan stakeholder sebagai acuan pelaksana kegiatan. Kebijakan pembuatan SOP penanganan Program Laserku di rancang untuk diterapkan di semua pelaksana program, evaluasi terus dilakukan melalui koordinasi antar pelaksana, hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Adanya SOP ini juga sebagai bentuk konsistensi serta efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan.

2) Fragmentasi

Fragmentasi adalah derajat pemisahan fungsi-fungsi atau unit-unit kerja dalam sebuah birokrasi, yang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan keterpaduan antar bagian. Dalam sebuah kebijakan, fragmentasi dapat berarti positif maupun negatif, pembagian fragmentasi secara tepat akan menciptakan organisasi birokrasi dengan etos kerja yang baik dan maksimal, dengan pembagian tupoksi tugas yang seimbang dan sesuai keahlian serta dibarengi kerja sama tim yang kuat akan menghasilkan kualitas kinerja yang baik dan pelayanan yang maksimal. Secara keseluruhan fragmentasi birokrasi dalam Program Laserku telah menunjukkan pembagian tugas yang seimbang sesuai keahlian pelaksana dalam bidang masing-masing, koordinasi tim dalam menyelesaikan masalah target sasaran yang berbeda mengharuskan para stakeholder untuk terus menjaga koordinasi yang baik dan melakukan evaluasi program dengan cara menerima kritik dan saran yang membangun. Program Laserku dalam implementasinya

membagi satuan kerja pelaksana sesuai tugas yang dijalankan yaitu, Pembina, Pengarah, Penanggung jawab, Ketua Pelaksana, Wakil ketua, Sekretaris, Koordinator program, Pelaksana teknis, dan Mitra kerja. Pembagian tersebut didasarkan pada tugas-tugas yang sudah di petakan menurut keahlian masing-masing pelaksana, sehingga diharapkan program yang dijalankan berjalan maksimal dan sesuai tujuan awal.

PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi. Menurut teori George C. Edwards III, komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan, terutama terkait dengan kebijakan publik. Komunikasi yang efektif dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Komunikasi menurut Laswell dalam Kustini (2017) dalam (Supit, 2023) adalah proses pertukaran informasi, gagasan, pandangan, atau perasaan antara individu atau kelompok. Sedangkan menurut De Fleur pada buku *Fundamentals of Human Communication* (1990:192) dalam (R. M. Putri et al., 2023) komunikasi organisasi sebagai transmisi pesan melalui saluran formal dan informasi dalam kelompok yang relative besar dan sengaja dibentuk, menghasilkan pembangunan makna yang memiliki pengaruh terhadap anggota-anggotanya, baik sebagai individu dan kelompok secara keseluruhan. Selain itu komunikasi dalam organisasi ini mencakup semua proses verbal dan nonverbal, baik secara linier maupun transaksional.

1) Transmisi

Proses transmisi komunikasi dari pembuat kebijakan ke Masyarakat memiliki tim tersendiri, pembentukan Tim Laserku Kecamatan yang terdiri dari Puskesmas dan Tim Desa dimaksudkan untuk transmisi komunikasi langsung pada Masyarakat dan penanganan serta pendataan Masyarakat sasaran agar lebih terorganisir dengan baik. Pembagian ini sesuai dengan 92 tupoksi masing-masing agar program dapat berjalan maksimal seperti tujuan. Kunjungan yang dilakukan oleh Bupati Lamongan maupun perwakilannya di beberapa kecamatan sebagai controlling program juga berpengaruh terhadap informasi yang didapat oleh para pelaksana program dilapangan. Transmisi informasi yang berjalan langsung antara pelaksana dan pembuat kebijakan membuat kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dapat tersampaikan secara langsung.

Penelitian terdahulu terkait kebijakan kesehatan lingkungan oleh (Tiantara, 2021) menjelaskan bahwa parameter komunikasi terdiri dari sosialisasi program dan forum diskusi grup dengan para stakeholder. Transmisi komunikasi yang terjadi melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh seluruh pihak yang terlibat tentu akan menghasilkan kualitas informasi yang jelas dan tepat untuk disampaikan kepada masyarakat. Analisis tersebut berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Transmisi komunikasi menjadi bagian dari komunikasi yang mempengaruhi kualitas informasi yang akan disampaikan oleh para pembuat kebijakan pada Masyarakat, sehingga perlu didukung dengan kegiatan dan pembentukan tim yang dapat mendukung serta berkompeten dibidangnya sehingga nantinya diharapkan transmisi tersebut dapat berjalan dengan baik dan maksimal, Program prioritas Lamongan Sehat telah membentuk Tim yang memang ditujukan untuk transmisi komunikasi antara pelaksana dan masyarakat sasaran, hal ini berdampak positif pada pelaksanaan program di lapangan, sehingga program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

2) Kejelasan

Pembentukan SOP program Laserku oleh para pembuat kebijakan ditujukan untuk memberi kejelasan informasi kepada para pelaksana agar mengetahui tahapan-tahapan penanganan dan rujukan Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama maupun Fasilitas kesehatan tingkat lanjut, serta pembuat SOP tersebut dapat menjadi informasi penjelas yang akan disampaikan oleh para pelaksana kepada Masyarakat sasaran yang masih awam terhadap program Laserku tersebut. Sejauh yang penulis dapatkan, kejelasan informasi mengenai penyampaian program kepada masyarakat sasaran dan antar pelaksana program

terjalin dengan baik dan koordinasi dilakukan secara merata. Pemecahan masalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk menemukan solusi terkait kendala yang sedang dihadapi. Kejelasan komunikasi terkait penyampaian program dari para pelaksana kepada masyarakat terjalin salah satunya melalui jembatan pembentukan SOP yang jelas dan terstruktur.

3) Konsistensi

Korelasi penerapan komunikasi yang konsisten berpengaruh terhadap praktik implementasi program. Konsistensi informasi di program Laserku ini dilakukan oleh seluruh pelaksana program yang telah ditugaskan pemerintah, Beberapa masalah disinformasi timbul akibat tidak tersampainya informasi secara merata akibat tidak dilakukannya konsistensi terhadap sosialisasi informasi kepada pihak-pihak terkait. Kendala yang muncul akibat disinformasi salah satunya adalah kesalah pahaman yang terjadi antara pihak pelaksana dan masyarakat sasaran, namun tidak jarang hal ini juga terjadi antara para pihak pelaksana. Solusi yang dilakukan terkait kendala tersebut menurut penuturan Ibu Sujilah selaku penanggung jawab program Laserku di Kecamatan Sugio adalah dengan melakukan konfirmasi terkait kesalah pahaman yang ada dengan menghubungi stakeholder yang bersangkutan, hal tersebut juga berlaku ketika kesalah pahaman terjadi antara pihak pelaksana program dan masyarakat sasaran. Terkait hasil penelitian yang dilakukan konsistensi informasi program Laserku di Kecamatan Sugio khususnya Desa Karangsambigalih berjalan baik dan terkoordinasi. Hal itu juga dijabarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dengan konsisten melakukan rapat evaluasi program selama 1 bulan sekali untuk mengontrol berjalannya program dilapangan. Konsistensi sebuah komunikasi yang dilakukan oleh sebuah pelaksana organisasi program akan berdampak pada kualitas komunikasi yang terjalin antara semua pelaksana program , serta hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap kuliatas informasi yang akan didapatkan.

2. Sumberdaya

Edward III, dalam konteks teori implementasi kebijakan, menekankan pentingnya sumber daya manusia dalam keberhasilan penerapan kebijakan. Ia menyatakan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten adalah kunci untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Edward III menekankan bahwa implementasi kebijakan yang sukses memerlukan kombinasi dari sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang mencukupi, sarana prasarana yang memadai, struktur birokrasi yang efisien, komunikasi yang jelas, dan disposisi (sikap) yang positif dari para pelaksana.

1. Sumberdaya Manusia

Dalam pelaksanaannya, Program Laserku menerapkan pembagian tugas sesuai dengan keahlian para pelaksana. Pembagian tersebut mengacu pada tingkat efektivitas yang dapat dihasilkan secara lebih maksimal ketika faktor-faktor penting tersebut dirancang dan didiskusikan secara matang dan terstruktur. Budaya koordinasi diterapkan diseluruh lapisan anggota yang terlibat dalam program Laserku tersebut. Secara kualitas para tim yang terlibat sudah berkompeten dibidangnya namun keterbatasan jumlah anggota tim kesehatan perlu lebih diperhatikan.

Sumberdaya manusia di sebuah program menjadi aspek utama penunjang berjalannya program, sumberdaya manusia yang kompeten menunjang kualitas penanganan berjalannya suatu program, pengaruh tersebut tentu akan sangat menjadi pertimbangan pada pemilihan para pelaksana program. Para pelaksana program Laserku dipilih sesuai dengan tupoksi dan keahliannya dalam bidang yang diampu sehingga pelaksanaan program dapat berjalan maksimal.

2. Sumberdaya Finansial

Dalam penetapan program Laserku sebagai program prioritas yang masuk kedalam RPJMD Kabupaten Lamongan, perhitungan anggaran sudah dilakukan sebelum penetapan tersebut di sahkan. Anggaran yang dipergunakan untuk program Laserku ini bersumber dari APBD Kabupaten lamongan yang dibagi-bagi sesuai poin-poin kebutuhan program. Beberapa keterangan yang penulis dapatkan yakni anggaran tersebut dipergunakan untuk mengcover

biaya rumah sakit, biaya transport, biaya obat-obatan, biaya fasilitas kesehatan yang digunakan, dan pembenahan masalah lain yang terjadi kepada pasien sasaran.

Pengeluaran anggaran ini tidak termasuk tambahan insentif pada tenaga kesehatan maupun tenaga pemerintahan yang bertugas dalam pelaksanaan program tersebut, hal ini dikarenakan gaji atau honor yang didapatkan oleh pelaksana program sudah masuk kedalam hitungan pengeluaran yang lain yang berkaitan dengan kepegawaian di lingkup pemerintahan Kabupaten Lamongan. Juga berbeda dengan insentif yang diberikan oleh Desa Karangsambigalih kepada ibu-ibu kader yang diminta tolong untuk membantu mengurus kebutuhan Masyarakat pada sektor kontrol program desa sendiri. Penambahan insentif dapat dijadikan pilihan untuk diberikan kepada pelaksana program ketika memang hal tersebut menjadi pilihan yang tepat dan anggaran yang digunakan cukup. Alasan ini bisa dikategorikan sebagai strategi mengefektifkan peran tenaga pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan program. Sumberdaya finansial pada setiap program tidak dapat disamaratakan, kebutuhan tersebut disesuaikan dengan keperluan yang dibutuhkan selama kegiatan itu berlangsung, sehingga rancangan anggaran suatu program harus di rancang secara matang dan terstruktur sebagai antisipasi membludaknya anggaran yang ada.

3. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Kebutuhan sarana prasarana program Laserku meliputi tempat perawatan pasien dengan fasilitas yang memadai, obat-obatan, alat-alat medis, kendaraan sebagai saran transportasi dan lain sebagainya. Ketika kebutuhan tersebut terpenuhi efektifitas pemaksimalan program dapat direalisasikan. Sarana dan prasarana yang buruk membuat program tidak dapat berlangsung lama dan akhirnya mangkrak. Sesuai penelitian yang penulis lakukan, program Laserku di Kecamatan Sugio khususnya Desa Karangsambigalih memiliki fasilitas kesehatan yang memadai dan dapat menunjang aktivitas dilaksanakannya program kesehatan tersebut. Setiap pasien tentu memiliki kebutuhan yang berbeda, namun strategi koordinasi yang dilakukan untuk pemenuhan sarana dan prasarana sudah diatur dalam SOP program Laserku di rapat evaluasi program yang diselenggarakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Fasilitas yang didapatkan oleh pasien sasaran tentunya sesuai dengan SOP kesehatan yang berlaku, kontrol rutin yang dilakukan guna memastikan keadaan pasien tidak hanya menasar pada aspek kesehatan tapi juga mencakup keadaan tempat tinggal pasien. Dengan koordinasi pada pihak-pihak stakeholder program, penanganan pasien terkait fasilitas sarana prasaran apa saja yang dibutuhkan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

3. Disposisi

Disposisi, dalam pengertian Edward III, merujuk pada kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaksana kebijakan untuk benar-benar melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. Edward III menyatakan bahwa disposisi adalah faktor penting ketiga dalam keberhasilan implementasi kebijakan, selain komunikasi dan sumber daya. Sedangkan Menurut Katz (1993:1) dalam (Hakim, 2019) “tendency to exhibit frequently, consciously, and voluntarily a pattern of behavior that is directed to a broad goal”, yang artinya disposisi merupakan kecenderungan untuk sadar, teratur, dan sukarela dalam berperilaku tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan.

a.) Komitmen

Komitmen para pelaksana program Laserku tercermin ketika dihadapkan pada kendala-kendala yang muncul serta regulasi SOP yang mengalami salah tangkap informasi. Komitmen untuk tetap menjalankan program dengan baik tentunya berpengaruh pada jalannya program Laserku. Menurut Ibu Mujilah selaku penanggung jawab program Laserku Kecamatan Sugio dan Bidan Desa Karangsambigalih komitmen untuk melaksanakan program ini semata-mata ingin memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada Masyarakat lewat naungan program rancangan pemerintah tersebut. Banyak Masyarakat yang terbantu lewat adanya program Laserku tersebut. Beberapa diantaranya yaitu pendataan warga miskin yang semakin lengkap, kontrol terhadap kesehatan Masyarakat yang menyeluruh, dan kesulitan lain yang dihadapi Masyarakat perlahan mulai terbantu.

b.) Kejujuran

Dalam implementasi program Laserku di Lokasi penelitian yang penulis ambil menunjukkan hasil bahwa pemanfat sumber dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dikelola dengan bijak dan mengedepankan asas kejujuran. Hal ini terlihat ketika data penerima program Laserku yang cukup tinggi berbanding lurus dengan pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh pihak pelaksana. Beberapa tugas mengenai pendataan fasilitas dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pihak pelaksana telah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan, tidak dilebihkan maupun di kurangi.

c.) Sifat Demokratis

Adanya sifat demokrasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan terkait kritik dan saran yang diberikan terkait program yang sedang dilaksanakan membuat evaluasi terhadap implementasi kebijakan pada program Laserku tersebut menjadi terbuka. Musyawarah terkait rancangan program dan SOP yang digunakan pada implementasi program menjadikan keterbukaan atas segala yang membangun, dan dengan cara tersebut memudahkan Pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan evaluasi apa saja kendala dan kekurangan yang ada pa program Laserku tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III dalam (Laary et al., 2022) merupakan faktor penting ke empat dalam implementasi kebijakan publik. Struktur Birokrasi menurut (Endah & Vestikowati, 2021) adalah suatu sistem organisasi yang terstruktur dengan hierarki yang jelas, pembagian kerja, dan aturan yang diketahui, serta justifikasi keputusan berdasarkan kebijakan yang telah disahkan. Struktur birokrasi dalam sebuah organisasi maupun implementasi sebuah program akan mempengaruhi jalannya kegiatan ataupun organisas tersebut. Pemilihan anggota yang memiliki kapabilitas yang mumpuni dan kompeten dibidangnya akan tentu membantu berjalannya kegiatan maupun instansi tersebut. Ide dan kontribusi yang diberikan oleh seseorang yang ahli dibidangnya tentu menjadi sebuah angin segar dan pembaharuan untuk menjadikan kegiatan dan instansi tersebut semakin sesuai dengan tujuan awal yang digaungkan. Pada program Laserku struktur birokrasi ditentukan oleh perancang kebijakan dengan mengadakan musyawarah terkait pemilihan pihak-pihak siapa saja yang akan menjadi bagian pelaksana pada program tersebut. Beberapa pelaksana dicantumkan menyusul terkait evaluasi program yang dilakukan oleh pihak perancang dan penanggung jawab kebijakan. Hasil yang penulis dapatkan pada wawancara dengan narasumber menunjukkan hasil bahwa pelaksana pada program ini berkompeten dan berkontribusi maksimal terhadap program ini. Penambahan stakeholder yang semula tidak ada pun sesuai dengan persetujuan pimpinan melalui riset terkait implementasi program yang sudah dijalankan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai implementasi Program Prioritas Lamongan Sehat dan Sejahtera dengan Kunjungan Rumah (LASERKU) di Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Kesimpulan ini disusun berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, serta bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian. Kesimpulan yang disajikan diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan program serta dampaknya terhadap kesejahteraan kesehatan masyarakat di lokasi penelitian.

Komunikasi yang ada memiliki beberapa bagian dalam penyampiannya yakni dimulai dari transmisi komunikas, hal ini menjadi bagian dari komunikasi yang mempengaruhi kualitas informasi yang akan disampaikan oleh para pembuat kebijakan pada Masyarakat, sehingga perlu didukung dengan kegiatan dan pembentukan tim yang dapat mendukung serta berkompeten dibidangnya sehingga nantinya diharapkan transmisi tersebut dapat berjalan dengan baik dan maksimal, Program prioritas Lamongan Sehat telah membentuk Tim yang memang ditujukan untuk transmisi komunikasi antara pelaksana dan masyarakat sasaran, hal ini berdampak positif pada pelaksanaan program di lapangan, sehingga program

tersebut dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya yaitu kejelasan komunikasi terkait penyampaian program dari para pelaksana kepada masyarakat terjalin salah satunya melalui jembatan pembentukan SOP yang jelas dan terstruktur. Konsistensi sebuah komunikasi yang dilakukan oleh sebuah pelaksana organisasi program akan berdampak pada kualitas komunikasi yang terjalin antara semua pelaksana program, serta hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap kualitas informasi yang akan didapatkan.

Faktor selanjutnya sesuai dengan indikator Edward III adalah Sumberdaya, yakni meliputi Sumberdaya manusia, finansial, sarana dan prasarana. Sumberdaya manusia di sebuah program menjadi aspek utama penunjang berjalannya program, sumberdaya manusia yang kompeten menunjang kualitas penanganan berjalannya suatu program, pengaruh tersebut tentu akan sangat menjadi pertimbangan pada pemilihan para pelaksana program. Para pelaksana program Laserku dipilih sesuai dengan tupoksi dan keahliannya dalam bidang yang diampu sehingga pelaksanaan program dapat berjalan maksimal. Sumberdaya finansial pada setiap program tidak dapat disamaratakan, kebutuhan tersebut disesuaikan dengan keperluan yang dibutuhkan selama kegiatan itu berlangsung, sehingga rancangan anggaran suatu program harus di rancang secara matang dan terstruktur sebagai antisipasi membludaknya anggaran yang ada. Sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas implementasi sebuah kebijakan, kualitas sarana dan prasarana yang baik mendorong tercapainya implementasi kebijakan yang positif dan lebih maksimal. Pemenuhan kebutuhan tersebut tak lepas dari peran pemerintah, sebagai fasilitator program dan pembuat kebijakan publik, penting bagi pemerintah untuk melakukan pemantauan dan kontrol rutin terhadap sarana dan prasarana yang ada di lapangan. Faktor berikutnya yakni disposisi, sifat kejujuran, komitmen, serta sifat demokratis berpengaruh terhadap pelaksanaan indikator disposisi tersebut.

Pengangkatan birokrasi yang sesuai dengan tupoksi dan berkompeten serta pemberian insentif pada kader yang diambil dari Masyarakat menjadi satu pelengkap dalam berjalannya suatu pelaksanaan program. Terakhir yakni struktur organisasi, struktur organisasi suatu program dirancang dengan pertimbangan para pelaksana program yang berkompeten dibidangnya, pengangkatan birokrasi anggota pelaksana program Laserku telah melalui tahap musyawarah yang diadakan oleh para pembuat kebijakan dengan pertimbangan studi kasus masalah Masyarakat sasaran. Program Prioritas Lamongan Sehat dan Sejahtera dengan Kunjungan Rumah tentunya menjadi program yang baik untuk diimplementasikan, terkait manfaatnya terhadap Masyarakat dengan memudahkan akses pelayanan kesehatan dan pendataan keluarga yang kurang mampu, disabilitas, hidup sebatang kara, dan pengidap penyakit kronis. Pembentukan program ini tak lepas dari keprihatinan pemerintah ketika melihat masih banyaknya Masyarakat yang belum terdata Jaminan Kesehatan Nasional dan kurangnya informasi terkait program-program kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Program ini juga di harapkan dapat membantu menjaring masyarakat yang masih luput dari pendataan terkait masalah-masalah sosial yang dialami. Dengan penerapan serentak diseluruh wilayah di Kabupaten Lamongan diharapkan manfaat yang ditimbulkan akan semakin luas dan dapat membantu lebih banyak Masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, N., Program, T., Manajemen, S., Kesehatan, I., Kesehatan, I.-I., Esa, U., Jakarta, U., Arjuna, J., No, U., Jeruk, K., & Barat, J. (2018). Analisis Segitiga Kebijakan Kesehatan Dalam Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Perkam Medis Dan. In Angka Kreditnya Jurnal INOHIM (Vol. 6).
- Endah, K., & Vestikowati, E. (2021). Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jurnal Moderat, 7(3).
- Engkus. (2022). Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi Serta Perubahan) (F. Rezeki, Ed.). PT Kimshafi Alung Cipta.
- Ginting, D. I., & Lubis, I. (2023). Pengaruh Angka Harapan Hidup Dan Harapan Lama Sekolah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Bisnis Net.
- Hakim, A. R. (2019). Menumbuhkembangkan Kemampuan Disposisi Matematis Siswa Dalam Pembelajaran Matematika.
- Ibad, D. A., & Megawati, S. (2024). Program Keluarga Berencana: Studi Implementatif Terhadap Pendekatan Komunikasi Publik “Edward Iii” Di Kota Kediri. Publika, 12 Nomor 3.

- Irwanto, R. (2024). View Of Kapabilitas Dan Relasi Antar Aktor Pemerintah Dalam Penanganan Stunting_ Studi Di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*.
- Jumiati, I. (N.D.). Aspek Penting Disposisi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Perkotaan.
- Laary, Y., Tulus, F., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, VIII, 60–67.
- Ma'ruf, F., Rares, J., & Ruru, J. (N.D.). Implementasi Kebijakan Standar Operasional Prosedur Pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Manado.
- Nursalim. (2017). Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017.
- Posangi, H., Lengkong. Florence, & Dengo, S. (N.D.). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Putri, J. E., & Prabawati, I. (2023). Implementasi Program Rumah Pemulihan Gizi Gerak Membagi Makanan Bersama (Gesit Gembira) Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. 11 Nomor 4.
- Putri, R. M., Lisdiana, L., & Hakim, A. R. (2023). Implementasi Kebijakan Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. @-Publik: *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.37858/publik.v3i1.346>
- Rahmatillah, A., Alqarni, W., & Afrijal. (2023). Implementasi Program Aceh Green Ditinjau Dari Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Edward Iii. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Usk*, 8, No 3.
- Roni, V., Kusnadi, D., & Arifin. (N.D.). Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau. *Publika, Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Universitas Tanjungpura Pontianak. <https://Jurnafis.Untan.Ac.Id>
- Sunarto. (2021). Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Kearsipan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Ii. 3 No. 2.
- Supit, B. F. (2023). Konsep Dasar Komunikasi Organisasi (E. Lumingkewas, Ed.). Tahta Media Group.
- Tiantara, E. P. (2021). Implementasi Kebijakan Program Kesehatan Lingkungan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. *Redaksi Jurnal Ilmu Administrasi Reformasi Universitas Swadaya Gunung Jati*. <https://Doi.Org/10.33603/Reformasi.V4i1>
- Topatimasang, Roem. (2013). Memanusiakan lanjut usia : penuaan penduduk & pembangunan di Indonesia : kumpulan makalah & diskusi Lokakarya 'Penuaan Penduduk dan Pembangunan : Dokumentasi, Tantangan & Langkah Lanjut ', Yogyakarta, 19-20 November 2012 (1st ed.). SurveyMeter.
- Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat.